

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

JAKARTA MASA HINDIA BELANDA

OLEH:

TAWALINUDDIN HARIS

DIBIYAI OLEH

PROYEK OPF 1995/1996

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS INDONESIA

1995

PERPUSTAKAAN

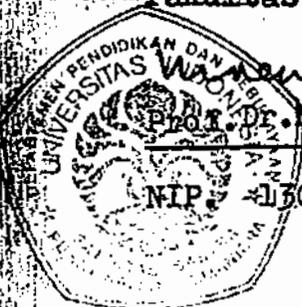
FAKULTAS SASTRA U.I.

Jakarta masa..., Tawalinnuddin Haris, FIB UI, 1995.

Formbar Pengesahan

- A. Judul penelitian : Jakarta Masa Hindia Belanda.
- B. Bidang ilmu yang diteliti : Sejarah
- C. Peneliti
1. Nama lengkap dengan gelar : Drs. Tawalinuddin Haris MS.
 2. NIP : 130 536 709
 3. Golongan/Jabatan/Pangkat : IV/a, Lektor/Pembina
- D. Fakultas : Sastra
- E. Universitas : Indonesia
- F. Lokasi penelitian : Jakarta dan sekitarnya

Mengetahui
Kepala Pusat Kajian Humaniora
Fakultas Sastra UI

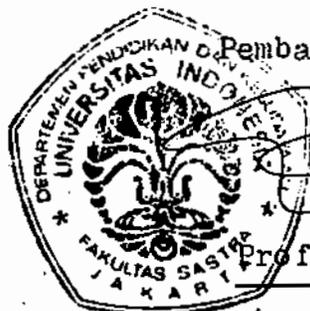


Prof. Dr. Mundardjito
NIP. 130 187 661

Depok, September 1995
Peneliti,

Tawalinuddin Haris
NIP. 130 536 709

Mengetahui,



Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Sastra UI

Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono

NIP. 130 237 488

JAKARTA MASA HINDIA BELANDA

Tawalinuddin Haris

ABSTRAK

Dalam penelitian ini diungkapkan berbagai aspek berkenaan dengan situasi dan kondisi Jakarta (Batavia) masa Hindia Belanda , baik sebagai wilayah administratif maupun sebagai kota pusat pemerintahan kolonial selama kurun waktu sekitar satu seperempat abad. Selama itu telah terjadi perubahan dan perkembangan, baik dibidang politik, pemerintahan, penataan wilayah, ekonomi dan sosial budaya. Namun karena luas serta kompleksnya permasalahan, maka penelitian ini memfokuskan diri pada perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta (Batavia) dalam sistim pemerintahan kolonial, sebab perubahan sistim pemerintahan dan berkembangnya fungsi serta kedudukan Jakarta (Batavia) dalam sistim pemerintahan kolonial menjadi salah satu alasan dalam penataan wilayah administratif dan berkembangnya jumlah penduduk. Sejauh mana perubahan-perubahan yang dimaksud telah berlangsung serta keterkaitannya satu sama lain menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian tujuan penelitian ini memberikan informasi berkenaan dengan perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta (Batavia) pada kurun waktu tertentu sebagai sumbangan data dalam penulisan sejarah Jakarta pada umumnya.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, selain penelitian kearsipan sebagai data utama, dilakukan ~~telah~~ pustaka terutama terhadap buku-buku atau artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan obyek yang dikaji. Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta (Batavia) selama pemerintahan Hindia Belanda, selain dipengaruhi oleh sistim pemerintahan yang ada, juga karena diintrodusirnya birokrasi modern (kolonial), diberlakukannya Sistim Tanan Paksa dan Politik Etis.

(FSUI; DIP-OPF 1995/1996 ; 37 hlm.)

KATA PENGANTAR

Penelitian ini merupakan salah satu diantara penelitian yang dikoordinasikan oleh Koordinator Penelitian Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan dibiayai oleh dana OPF 1995//1996. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berkenaan dengan perkembangan wilayah dan status Jakarta (Batavia) masa Hindia Belanda dan berusaha mengungkapkan jumlah penduduk serta perkembangannya pada masa itu.

Kepada pimpinan Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang telah mengusahakan data penelitian, kami mengucapkan banyak terima kasih, demikian juga kepada semua pihak yang telah membantu pengumpulan data, baik di perpustakaan maupun di Arsip Nasional sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR ISI

	halm. .
Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1 - 7
A. Latar Belakang	1 - 6
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sumber Data	7
Pembahasan	8 - 28
Penduduk dan Perkembangan Wilayah	8 - 14
Analisa Perkembangan Penduduk	14 - 28
Penutup	29 - 31
Daftar Pustaka	35 - 37
Lampiran - Lampiran	
Tabel - tabel	
Peta - peta	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1790 Parlemen Belanda mengambil alih kontrol atas VOC yang kemudian diikuti dengan pembubarannya pada tanggal 31 Desember 1799. Lima tahun kemudian (1795) Negeri Belanda jatuh ketangan pasukan Perancis sehingga semua milik kompeni, baik di negeri Belanda maupun di luar negeri termasuk Indonesia beralih ketangan pemerintah baru yang disebut Bataafsche Republiek. Sejak itu pula Negeri Belanda telah berubah dari suatu negara konfederasi (Republiek der Vereenigde Nederlanden) menjadi negara kesatuan. Dalam salah satu charternya ditetapkan bahwa pemerintah jajahan atas kepulauan Indonesia akan dijalankan oleh suatu dewan yang dinamakan Raad der Aziatische Bezittingen.¹⁾ Ketika pada tahun 1806 Bataafsche Republiek berubah menjadi negara monarchi dengan nama Het Koninkrijk Holland, maka Raad van Aziatische Bezittingen dihapuskan dan kekuasaan atas daerah jajahan termasuk Indonesia berada dibawah pengawasan Menteri Perdagangan dan Jajahan. Untuk menanganikan daerah jajahan diangkatlah seorang Gubernur Jendral; pada bulan Januari 1807 Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jendral untuk Aziatische Colonien en Bezittingen, yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Tugas utamanya adalah mempertahankan koloni karena pada waktu itu Imperium Perancis sedang berperang melawan Inggris. Selain itu kepada Daendels ditugaskan juga untuk memperbaiki keadaan kesehatan kota Batavia, karena Batavia yang tadinya dijuluki Ratu Dari Timur (Koningin van Oosten), dalam abad ke-18 telah berubah menjadi kuburan orang Belanda. (Graf der Hollanders)²⁾

karena banyaknya orang Belanda yang meninggal akibat buruknya kesehatan kota. Sehubungan dengan hal itu Daendels kemudian memutuskan bahwa benteng kota sudah tidak dapat dipertahankan lagi, ia kemudian memindahkan pusat pemerintahan agak ke dalam (suburd), Weltevreden. Pada tahun 1810 Daendels memerintahkan membongkar tembok kota dan menghancurkan benteng, sebagian batu-batunya dipergunakan untuk membangun bangunan di Weltevreden. Meskipun Batavia Lama sudah ditinggalkan sebagai pusat pemerintahan, para pedagang tetap tinggal disana, bahkan dihuni kembali setelah orang-orang Eropa pindah ke selatan. Sejak itu tidak ada lagi pemisahan antara penduduk di dalam dan di luar benteng seperti masa sebelumnya.

Karena pada waktu itu Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis, maka iapun ikut terseret dalam kancah peperangan dengan Inggris. Sebagai akibat kemenangan Inggris, kepulauan Indonesia pun akhirnya pindah ke tangan Inggris. Untuk menangani kepenetingannya di kepulauan Nusantara Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jendral pada tahun 1811. Meskipun Raffles sempat mengadakan berbagai perubahan dalam lembaga pemerintahan namun pemerintahan Inggris tidak berlangsung lama sebab setelah berakhirnya peperangan antara Perancis dengan Inggris pada tahun 1814, Belanda muncul sebagai negara merdeka dan Inggris mengembalikan semua bekas jajahan Belanda yang didudukinya. Pada tahun 1816 Belanda memperoleh kembali bekas jajahannya, termasuk Indonesia. Pemerintah Belanda kemudian membentuk Pemerintah Hindia Belanda atas kepulauan Nusantara yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Masa Hindia Belanda berlangsung sekitar satu seperempat abad, berakhir de-

ngan pendudukan Jepang. Selama pemerintah Hindia - Belanda berlangsung telah terjadi berbagai perubahan, yang disebabkan perubahan sikap serta pandangan pemerintah kolonial Belanda mengenai daerah jajahannya sebagai dampak berkembangnya paham rationalisme di Eropah Barat. Menurut Robert Cribb,³⁾ perubahan-perubahan penting yang terjadi di Hindia-Belanda selama kurun waktu abad ke-19 sampai dengan perempatan pertama abad ke-20 adalah perkembangan dalam administrasi pemerintahan yang terpisah dari Negeri Belanda, yang lama kelamaan berkembang kearah isu-isu yang lebih sensitif seperti kewarganegaraan dan demokrasi.

Seperti diketahui bahwa pada dasarnya kolonisasi sering dikaitkan dengan intres-intres tertentu seperti ekonomi, strategi atau ideologi, namun intres tersebut menurut Rober Cribb⁴⁾ jarang sekali ditangani secara tepat atau persis sama dengan di negara induknya oleh penguasa di daerah jajahan, sehingga pada akhirnya koloni (jajahan) cenderung membuat peraturan atau sistim administrasi yang berbeda. Dalam sistim pemerintahan ada beberapa contoh perubahan atau perkembangan yang dianggap penting di Hindia- Belanda; pada tahun 1834 jabatan atau posisi Komisariss Jendral yang merupakan agen pemerintah Belanda di Hindia-Belanda di hapuskan sehingga Gubernur Jendral merupakan penguasa tunggal di daerah jajahan yang kadang-kadang lebih banyak bertindak mempertahankan keutuhan wilayahnya dari pada sebagai agen pemerintah Belanda.⁵⁾ Pada tahun 1913 departemen-departemen yang ada di Hindia-Belanda dinyatakan terpisah dari departemen di Negeri Belanda, bahkan pada tahun 1922 koloni yang dalam hal ini Hindia-Belanda diberi status Rijkdeel yang setingkat dominion yang

secara formal mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kerajaan. Proses yang kedua oleh Robert Cribb⁶⁾ disebutnya sebagai "drama penguatan administrasi pemerintahan negara jajahan", karena lama kelamaan negara jajahan (koloni) memodifikasi apa yang disebut sistim dualistik, dimana administrasi pemerintahan dipegang oleh pejabat-pejabat yang terlatih tapi bukan berasal dari korp administrasi orang Eropa dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan melalui struktur politik pribumi. Dengan demikian meskipun birokrasi modern telah diintrodusir oleh penguasa Belanda, namun ditingkat bawah mulai dari kabupaten sampai tingkat desa (kalurahan) sistim birokrasi tradisional tetap dijalankan. Berbeda dengan masa sebelumnya kedudukan kelas penguasa (the ruling class) pada masa Hindia-Belanda mulai bergeser; elit-elit penguasa secara berangsur-angsur digantikan oleh elit baru karena kriteria jabatan tidak semata-mata didasarkan atas keturunan, tetapi faktor pendidikan, ketrampilan dan kemampuan ikut menjadi bahan pertimbangan. Di daerah Gouvernemen, yaitu di daerah-daerah di luar vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta), jabatan bupati maupun wedana diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah Hindia-Belanda ikut campur secara langsung. Bupati-hupati ini dinyatakan sebagai pegawai kerajaan Belanda dengan gaji yang tetap dan pasti.^{?)} Pungutan-pungutan dari desa yang tadinya dianggap sebagai penghasilan bupati, dibatasi jumlah maupun jenisnya. Dari desa bupati hanya dapat memungut sepersepuluh dari panen padi dan pajak kepala serta pajak-pajak lainnya yang menurut adat menjadi hak pembesar-pembesar rakyat. Para bupati dimasukkan hirarki administrasi pemerintahan kolonial dan men-

jalankan kewajibannya atas pemerintah dan pengawasan pejabat kolonial. Disisi lain perubahan dari pemerintah kompeni ke pemerintah kolonial sekonyong-konyong memungkinkan terjadinya migrasi spontan dari Negeri Belanda meskipun mereka itu bukan para pekerja dan petani sebagaimana yang selalu diminta oleh Jan Pieterszoon Coen kepada VOC untuk dikerahkan, melainkan borjuis-borjuis kecil dan para pedagang. Melalui Sistim Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang dilaksanakan pada tahun 1830, pulau Jawa dan sebagian besar pulau-pulau lainnya di Nusantara diubah menjadi jaringan perkebunan yang luas dan terorganisir dengan melibatkan aparat pemerintah kolonial, penguasa pribumi dan pihak swasta. Sistim Tanam Paksa yang telah memerosotkan penghasilan penduduk pribumi itu mendatangkan keuntungan yang besar pada pemerintah kolonial, bahkan dari keuntungan tersebut memungkinkan kompeni meluaskan wilayahnya keseluruh Nusantara. Jakarta sebagai pusat pemerintah Kolonial mendapatkan kemakmuran dengan diberlakukannya Sistim Tanam Paksa, sebab setelah VOC bubar tahun 1799, Jakarta (Batavia) akhirnya bangkit kembali dan berkembang menjadi pelabuhan dagang internasional dan pusat pemukiman kolonial yang cukup penting di Timur Jauh, Pada waktu itu Jakarta tidak hanya mampu membangun dan membiayai dirinya, -tapi mempunyai hasil bersih sekitar 823 juta gulden untuk kas negara di Den Haag, dan uang kiriman dari Jakarta (Batavia) ini dapat membiayai sekitar 30 % dari anggaran nasional Negeri Belanda.⁸⁾ Disamping itu dengan diberlakukannya politik Etis (Etika Politik) Jakarta kemudian berkembang sebagai pusat kebudayaan barat antara lain pendidikan modern. Semuanya itu menjadi daya penarik imigran da

ri seluruh pelosok tanah air datang dan tinggal di Jakarta sehingga menjadi pendorong bertambahnya jumlah penduduk.

B. Permasalahan

Perubahan sistim pemerintahan seperti diuraikan diatas tentunya membawa dampak terhadap penataan wilayah Hindia Belanda secara keseluruhan, termasuk wilayah Jakarta yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan kolonial. Dari data sejarah terungkap bahwa selama masa pemerintahan Hindia Belanda fungsi dan kedudukan Jakarta (Batavia) dalam sistim pemerintahan kolonial mengalami perkembangan, termasuk penduduknya. Selain itu perubahan dan penetapan status suatu wilayah dalam sistim pemerintahan negara didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain jumlah penduduk yang semakin bertambah. Dengan demikian masalah kependudukan ikut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu maka perkembangan penduduk Jakarta masa Hindia Belanda ini menarik diungkapkan untuk melihat keterkaitannya dengan perkembangan wilayah.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berkenaan dengan perkembangan wilayah dan status Jakarta (Batavia) masa Hindia Belanda sebagai sumbangan dalam penelitian sejarah Jakarta pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengungkapkan jumlah penduduk Jakarta dan merekonstruksi perkembangannya selama satu seperempat abad dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta keterkaitannya dengan pengembangan wilayah pada kurun waktu tertentu.

D. Metode Penelitian

Dalam pencaharian sumber data ditempat dengan penelitian ke - arsip dan kepustakaan dengan pendekatan metode sejarah. Pada tahap pertama penelitian lebih ditekankan pada penelitian kepustakaan untuk mengetahui sejauh mana kasus yang bersangkutan telah di - garap. Selain itu penelitian kepustakaan dianggap penting untuk membantu dalam memberikan informasi serta wawasan mengenai obyek yang dikaji. Dalam penelitian seperti ini sering ditemukan sumber-sumber sekunder yang bersifat primer. Sedangkan penelitian kearsipan sudah tentu memfokuskan diri pada sumber-sumber arsip yang tersimpan di Arsip Nasional . Diharapkan dari arsip-arsip ini yang merupakan sumber primer diperoleh data yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kasus yang sedang diteliti.

E. Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini ada data arsip, baik berupa dokumen tertulis maupun peta-peta, yang tersimpan di Arsip Nasional. Selain itu diperlukan juga data kepustakaan (buku maupun artikel) yang memiliki relevansi dengan obyek yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Penduduk dan Perkembangan Wilayah

Menurut peraturan dasar ketatanegaraan pemerintahan Hindia-Belanda atau Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie no.2 Tahun 1855, Hindia Belanda adalah suatu negara yang diperintah secara sentralisasi. Tetapi dalam pemerintahan yang sentralistis itu dijalankan juga dekon-sentrasi, dimana tugas pemerintahan dilimpahkan dari aparat pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat pusat yang lebih rendah tingkatannya secara hirarkis. Untuk setiap pejabat pusat yang disebar di seluruh wilayah negara ditetapkan suatu wilayah jabatan tertentu tempat ia menjalankan tugasnya. Menurut reglement tersebut, Jawa terbagi menjadi daerah-daerah administratif yang disebut gewest (kemudian menjadi residentie), yang masing-masing terbagi lagi menjadi afdeeling, district dan onderdistrict. Batavia dan daerah sekitarnya ditetapkan sebagai suatu residentie (Karesidenan) dengan kota Batavia sebagai ibukotanya. Wilayahnya dibagi dalam lima afdeeling, yaitu Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia, Afdeeling Meester Cornelis, Afdeeling Tangerang, Afdeeling Buitenzorg dan Afdeeling Karawang. Selain itu masih termasuk juga di dalamnya pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta yang sekarang dikenal dengan Kepulauan Seribu.⁹⁾

Susunan pemerintahan Hindia-Belanda yang sentralistis berlangsung sampai permulaan abad ke-20. Dari kalangan penduduk Eropa, Timur Asing dan Elite Indonesia baru muncul desakan agar pemerintahan disusun secara lebih modern dan demokratis. Dikalangan bangsa Belan-

da sendori timbul gerakan Etische Politiek (Politik Etis) yang menghendaki agar politik kolonial tidak semata-mata bertujuan mengeruk kekayaan bumi Indonesia saja, melainkan juga hendaknya meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat Indonesia. Kesemuanya itu mendorong pemerintah kerajaan Belanda untuk menetapkan suatu Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie pada tahun 1903. Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatiewet) ini memungkinkan pembentukan gewest (propinsi) atau bagian dari gewest yang memiliki keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan daerah (wilayah) yang bersangkutan. Decentralisatiewet 1903 ini dilaksanakan lebih lanjut dengan Decentralisatiebesluit (Staatsblad van Nederlandsch-Indie no.137 tahun 1905) dan Locale Rademordonantie (Staatsblad van Nederlandsch Indie no.181 tahun 1905). Menurut kedua peraturan tersebut daerah yang diberi keuangan tersendiri disebut Locaal Resort, sedangkan Raad-nya disebut Locale Raad. Locale Raad dapat dijadikan menjadi Gewestelijke Raad bagi gewest dan Plaatselijke Raad untuk bagian dari gewest, sedangkan untuk bagian gewest yang berupa kota dinamakan Gemeenteraad. Berdasarkan Ordonantie Staatsblad van Nederlandsch Indie no.204 tahun 1905, Batavia ditetapkan sebagai suatu gemeente (kotapraja). Luas wilayahnya sama dengan Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia, terkecuali pulau-pulau di Teluk Jakarta.¹⁰ Salah satu dampak perubahan status Batavia adalah sebagian dari perluasan kota mulai direncanakan. Di bagian selatan Koningplein (sekarang Lapangan Banteng) muncul residensi (pemukiman.) baru di daerah suburd (pinggiran) yang sebelumnya tidak termasuk wilayah Batavia, yakni daerah Menteng dan Gondangdia. Dan tidak seperti pola settle -

men sebelumnya, Menteng dan Gondangdia direncanakan secara eksklusif bagi pemukiman orang-orang Eropa.¹¹⁾ Untuk memudahkan pemerintahan wilayah gemeente van Batavia dibagi lagi menjadi dua distrik dan enam onderdistrik, yang masing-masing dikepalai oleh seorang wedana atau asisten wedana yang kedudukannya sejajar dengan patih atau regent.¹²⁾ Tiap-tiap onderdistrik dibagi lagi menjadi wijk-wijk yang berjumlah 27 buah dan masing-masing wijk dibagi lagi menjadi kampung-kampung sebagai unit terkecil.

Sesuai dengan Staatsblad no. 79 tahun 1908, wilayah gemeente van Batavia meliputi distrik Stad (Batavia) dan bovenstad (weltevreden). Distrik Batavia dibagi lagi dalam tiga onderdistrik , yaitu Manggabesar, Pejaringan dan Tanjung Perioek. Onderdistrik Manggabesar meliputi 5 wijk yaitu Manggadua, Kebon Jeruk, Pasar Baru, Gunung Sahari dan Kebon Kelapa. Pejaringan meliputi 4 wijk yaitu Penjaringan, Jembatan Lima, Krukut dan Angke Duri, sedangkan onderdistrik Tanjung Perioek meliputi 2 wijk, yaitu Tanjung Perioek dan Ancol. Wilayah distrik Weltevreden dibagi lagi menjadi 3 onderdistrik, yaitu Gambir, Senen dan Tanah Abang. Onderdistrik Gambir ada 5 wijk, yaitu Gambir, Gondangdia, Menteng, Tanah Abang dan Karet, sedangkan wilayah onderdistrik Senen meliputi 7 wijk , yaitu Senen, Kemayoran, Cempaka Putih, Tanah Tinggi (Kwitang Timur), Kramat, Kwitang dan Salemba. Yang terakhir onderdistrik Tanah Abang terdiri atas 4 wijk, yaitu Petojo, Slipi, Jati dan Jepang.¹³⁾

Dengan dikeluarkannya peraturan No. 366/1926, tepatnya pada bulan Oktober 1926, status pemerintahan Batavia berubah menjadi

Stadsgemeente. Sebenarnya perubahan peraturan ini tidak banyak membawa perubahan terhadap pemerintahan kota Batavia, sebab aparat pemerintahan tetap menjalankan fungsinya sebagaimana biasanya, demikian juga peraturan-peraturan yang lamapun masih tetap berlaku. Perubahan yang terjadi hanya pada dasar hukumnya, dimana kotapraja atau Stadsgemeente yang otonom ini sederajat dengan kabupaten dan keduanya berada dalam lingkungan satu propinsi.

Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1926 wilayah Stadsgemeente Batavia meliputi distrik Batavia dan Weltevreden yang termasuk dalam propinsi Jawa Barat, dengan ibukotanya Batavia. Pada tahun 1935 wilayah Stadsgemeente Batavia diperluas dengan penggabungan wilayah bekas Afdeeling Meester Cornelis. Oleh karena itu pada sensus yang dilaksanakan tahun 1920 dan 1930, penduduk Afdeeling Meester Cornelis masih dipisahkan dan dihitung secara terpisah dengan penduduk Stadsgemeente van Batavia. (lihat tabel 1) Luas wilayah Stadsgemeente van Batavia 811 hektar dengan jumlah penduduk 253.818 jiwa pada tahun 1920 dan 435.184 jiwa pada tahun 1930. Sedangkan luas wilayah Meester Cornelis 324 hektar dengan jumlah penduduk 52.491 jiwa pada tahun 1920 dan 91.831 jiwa pada tahun 1930.¹⁴⁾

Dari berbagai sumber dicoba untuk merekonstruksi pertumbuhan penduduk Jakarta (Batavia) pada masa Hindia Belanda , meskipun demikian dalam penelitian ini dianggap perlu untuk membicarakan penduduk Jakarta masa-masa transisi (setelah bubarnya VOC) berdasarkan data kependudukan oleh De Jonge.¹⁵⁾ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi kontinuitas atau diskontinuitas dengan ma

sa sebelumnya. Memasuki abad ke-19 data kependudukan kota Jakarta dan daerah sekitarnya menjadi lebih jelas karena sumber-sumber lebih akurat seperti hasil sensus, arsip-arsip kompeni dan laporan pemerintah kolonial (kolonial verslag). Meskipun demikian kesulitan tetap ada, sebab data kependudukan yang dicatat kemudian dilaporkan oleh pemerintah kolonial itu, tidak selalu dikaitkan dengan pembagian wilayah dalam sistim pemerintahan yang ada pada waktu itu. Sebagai contoh, dalam arsip pemerintah kolonial tahun 1821 dan 1822 dicatat dan dilaporkan jumlah penduduk Ommelanden saja , yakni 194.390 jiwa terdiri dari orang-orang Eropa, Cina, Moor, dan Inlander atau pribumi, tanpa disebutkan jumlah rinciannya. Penduduk sejumlah itu bermukim (bertempat tinggal) di 30 wilayah, yaitu Cilincing, Tanjung Oost, Simplicitas, Jelambar, Pondok Petung, Ka-daung Baru, Payong Koran, Tanjung Sention, Lagoa, Krangan, Pondok Bambu, Bidara Cina, Ulujami, Tanjung West, Tanah Abang, Salemba, Banglis, Condet, Lenteng Agung, Karet, Tanjung Periok, Pulo Gadung, Senayan, Kampung Makasar, Pondok Gede, Asyam, Cililitan, Meester Cornelis dan Weltevreden. Dengan demikian jumlah penduduk bekas kota lama dan sekitarnya (Batavia en Voerstedten belum disebutkan, sedangkan wilayah ommelanden yang dimaksudkan meliputi wilayah yang cukup luas; dari Tanjung Periok (di sebelah utara) sampai Lenteng Agung (di sebelah selatan), bahkan dimasukkan pula di dalamnya Pondok Gede yang pada saat ini termasuk wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi. Apakah wilayah ommelanden yang dimaksudkan identik dengan wilayah kabupaten atau karesidenan dengan masa-masa sebelumnya tidak begitu jelas. Kecuali itu masih ada nama-nama tem-

pat yang belum dapat diidentifikasi sehingga belum jelas lokasinya, seperti Lagoa, Banglis, Asyam, Payong Koran, Kadaung Baru, Simplicitas dan sebagainya.

Dari laporan Raffles ada kemungkinan wilayah yang disensus pada tahun 1815 meliputi wilayah kota lama yang sebelumnya dikelilingi tembok benteng, ditambah dengan daerah sekitarnya (Voorstad), di sebelah Timur, Barat dan Selatan. Dengan demikian belum termasuk di dalamnya daerah Weltevreden (bovenstad), sehingga jumlah penduduk yang dilaporkan oleh Raffles itu belum menggambarkan penduduk kota Jakarta secara keseluruhan sesuai dengan luas wilayahnya. Sejak tahun 1855, wilayah kota sepertinya identik dengan Afdeeling Batavia en Voorsteden dan sejak tahun 1908 dengan dibentuknya Gemeente van Batavia pada tahun 1905 wilayahnya ditambah dengan Weltevreden. Kemudian sejak tahun 1935 wilayahnya ditambah dengan Meester Cornelis, yang kemudian berlanjut sampai berakhirnya pemerintah Jepang. Dengan demikian ini berarti bahwa kalau berbicara mengenai penduduk Jakarta harus dikaitkan dengan luas wilayahnya dalam kurun waktu tertentu. Tapi sayang sekali data kependudukan yang diperoleh dari sumber-sumber kolonial, terkecuali hasil sensus tahun 1920 dan 1930, hanya menyebutkan jumlah penduduk pada kurun tertentu secara umum tanpa dikaitkan dengan luas dan status wilayah dalam sistim pemerintahan.

Kalau kita perhatikan tabel penduduk Jakarta yang disusun oleh Abdul Djalal¹⁷⁾ misalnya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Arsip-arsip kompeni dari tahun 1868 sampai 1885 menyebutkan jumlah penduduk Jakarta yang oleh Abdul Djalal dikaitkan dengan wilayah

kabupaten. Ada kemungkinan wilayah kabupaten yang dimaksudkan identik dengan Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia yang dibentuk sejak tahun 1855, sedangkan yang dimaksudkan dengan penduduk karesidenan adalah penduduk yang bermukim di Afdeeling di Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia, Afdeeling Meester Cornelis, Afdeeling Tangerang, Afdeeling Buitenzorg dan Afdeeling Karawang. Yang belum jelas adalah rincian jumlah penduduk sebelum tahun 1885 yang oleh Abdul Djalal dipilah-pilah menjadi penduduk kota, kabupaten dan karesidenan. Menurut Susan Abeyasekere, pada tahun 1850 penduduk kota Jakarta berjumlah 70.000 jiwa dan pada tahun 1900 berjumlah 115.000 jiwa, yang mendiami wilayah sekitar 10 sampai 12 km dari utara ke selatan.¹⁸⁾ Untuk periode sebelum abad ke-19 yang dimaksudkan dengan penduduk kota sebenarnya adalah penduduk yang bermukim di bekas kota lama, sedangkan yang dimaksudkan dengan penduduk kabupaten adalah penduduk yang bermukim di Ommelanden, seperti yang disebutkan dalam arsip-arsip kompeni. Pada tahun 1905 Batavia ditetapkan sebagai gemeente yang wilayahnya meliputi Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia ditambah Weltevreden. Oleh karena itu yang dimaksudkan oleh Abdul Djalal dengan penduduk kota identik dengan gemeente, yang sejak tahun 1926 wilayahnya ditambah dengan Meester Cornelis.

B. Analisa Perkembangan Penduduk

Dari tabel no.2 tampak bahwa penduduk Jakarta (Batavia)selama kurun waktu hampir 1,5 abad mengalami fluktuasi, meskipun secara keseluruhan jumlahnya terus meningkat sampai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda. Menurut laporan De Jong, pada tahun 1979

penduduk Jakarta berjumlah 172.682 jiwa dengan rincian 8.818 jiwa bermukim di dalam kota dan 163.864 jiwa di luar kota. Angka tersebut sedikit berbeda dengan perkiraan Radermacher dan van Hogendorp, yakni 173.107 jiwa dengan rincian 12.131 jiwa bermukim di dalam kota dan 160.986 jiwa di luar kota pada tahun yang sama. Sembilan tahun kemudian (1788) jumlah penduduk turun menjadi 141.501 jiwa, dengan rincian 7.175 jiwa bermukim di dalam kota dan 134.328 jiwa di luar kota. Tujuh tahun kemudian (1795) tanpa dirinci lokasi pemukiman mereka, Nederburg melaporkan bahwa jumlah penduduk Jakarta 144.986 jiwa yang berarti terjadi penurunan sekitar 3.485 jiwa, atau rata-rata sekitar 3.485 jiwa setiap tahunnya. Penurunan jumlah penduduk, baik pada sembilan tahun pertama maupun pada periode tujuh tahun berikutnya, diperkirakan karena masih tingginya angka kematian yang disebabkan kondisi lingkungan kota yang kurang sehat. Selain itu kondisi serikat dagang VOC yang hampir/sudah bangkrut tentunya membawa pengaruh terhadap jumlah orang Eropa, karena sebagian diantara mereka yang tadinya pegawai VOC pulang ke negerinya. Pada tahun 1815 Raffles melaporkan penduduk Jakarta berjumlah 47.217 jiwa, bermukim di kota lama dan daerah sekitarnya seluas 2 mil persegi. Mungkin yang dimaksudkan adalah kota lama dan kota depan (voorstad), timur, barat dan selatan. Jadi belum termasuk di dalamnya daerah Weltevreden yang sejak zaman Daendels sudah berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun yang sama Raffles melaporkan juga jumlah penduduk kabupaten (Afdeeling) dan karesidenan (Residentie) Batavia, masing-masing berjumlah 332.615 jiwa dan 439.952 jiwa. Tentunya jumlah tersebut sudah ter-

masuk di dalamnya yang 47.217 jiwa yang dilaporkan sebagai penduduk kota dan sekitarnya. Dari tabel 1 tampak bahwa secara umum jumlah penduduk Jakarta mengalami kenaikan. Kenaikan yang mencolok antara lain terjadi pada tahun 1848 sampai 1850 (selama 2 tahun) berjumlah 64.798 jiwa atau sekitar 28 persen. Kemudian antara tahun 1865 dan 1868, berjumlah 405.149 jiwa atau sekitar 44 persen selama 3 tahun. Kenaikan jumlah penduduk secara umum disebabkan menurunnya angka kematian. Gorkom misalnya melaporkan bahwa pada tahun 1819 angka kematian orang Eropa mencapai 227,7 perseribu orang, turun menjadi 54,1 perseribu orang pada tahun 1844. (lihat tabel 3) Bahkan Susan Abeyasekere melaporkan angka kematian orang Eropa terus menurun menjadi 29 perseribu orang pada tahun 1903-1911. Hal itu dapat dikaitkan dengan semakin meningkatnya kesehatan penduduk, terutama setelah ditemukannya kina sebagai obat anti malaria, yang pada waktu-waktu sebelumnya banyak mendatangkan kematian. Selain itu air minum yang sebelumnya diambil diambil dari kali Ciliwung, sejak tahun 1843 diambil dari sumur-sumur bor, terutama di daerah-daerah orang-orang Eropa bermukim. Dalam perkembangannya kemudian air-air yang diperoleh dari sumur (sumber) bor ini ditampung dalam reservoir (bak penampung), kemudian dialirkan dengan pipa ledeng keseluruh kota.¹⁹⁾

Sebab lain dari kenaikan jumlah penduduk ialah migrasi, baik orang Cina, Eropa maupun pribumi. Orang-orang Cina yang bermigrasi ke Jakarta pada waktu itu adalah orang Hokkian dari Propinsi Fujian, Cina Selatan. Bahkan seorang penilti Inggris, Victor Purcell berpendapat bahwa orang-orang Fujian inilah yang pertama kali ber-

mukim di Indonesia, terutama perantuan-perantuan Cina di Jawa.²⁰⁾ Mereka datang dan bermukim di lingkungan pedesaan sebagai petani di sekitar Tangerang, sehingga hal itu menambah jumlah penduduk karesidenan Jakarta (Batavia).

Sehubungan dengan banyak imigran Cina Hokkian ini, Pramudya Ananta Toer mengajukan bukti yang kemudian dikutip oleh Kong Yuan Zhi bahwa pada tahun 1935, 65,1 persen (379.611 jiwa)²¹⁾ dari jumlah orang Cina yang bermukim di Jawa dan Madura berasal dari Propinsi Fujian. Setelah berakhirnya Perang Candu pada pertengahan abad ke-19, Cina tumbang menjadi negara semi-feodal dan semi-kolonial, sejumlah besar petani dan penduduk kota jatuh pailit dan bangkrut tidak dapat hidup di negerinya sehingga mendorong mereka berani mengambil resiko yang tinggi mengarungi lautan luas. Akibatnya imigran-imigran Cina meningkat dengan cepat ke Asia Tenggara. Sebagai gambaran mengenai orang-orang Cina perantuan yang bermukim di Indonesia pada pertengahan abad ke-19 sebagai berikut. Pada tahun 1860 jumlah mereka 221.438 jiwa, sepuluh tahun kemudian (1870) menjadi 259.569 jiwa dan pada tahun 1880 menjadi 343.793 jiwa, sedangkan pada tahun 1890 menjadi 461.083 jiwa. Pada permulaan abad ke-20 gambaran tersebut naik lebih cepat lagi; pada tahun 1920 berjumlah 800.000 jiwa dan pada tahun 1930 menjadi 1.200.000 jiwa.²²⁾ Mengacu pada sumber-sumber yang dipublikasikan pada tahun 1940, diantara orang-orang Cina perantuan itu, 60 persen adalah Cina peranakan dan 80 persen dari yang peranakan ini berasal dari Zhangzhou dan Quanzhou di Propinsi Fujian.²³⁾ Menurut Kong Yuan Zhi,²⁴⁾ ada beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan hal itu terjadi,

peptama, orang-orang Cina yang datang dari Zhangzhou dan Quanzhou ke pulau-pulau di Laut Selatan pada umumnya menetap disana untuk beberapa tahun atau selama hidupnya sehingga memudahkan bagi anak cucu (keturunannya) untuk mengenal dan mempelajari lebih jauh adat kebiasaan dan cara hidup orang Indonesia. Menurut data statistik tahun 1930, 78 persen dari orang-orang Cina perantauan di Indonesia adalah orang-orang Fujian yang dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang-orang Cina dari Canton dan Chaozhou 60 persen diantaranya dilahirkan didaratan Cina. Dengan kata lain orang Cina Guangdong dan Chaozhou hanya 40 persen yang dilahirkan di Indonesia (peranakan). Yang kedua, secara ekonomi orang-orang Cina dari Fujian lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok lainnya, meskipun data yang memperkuat kesimpulan tersebut berasal dari masa setelah tahun 1950 an. Dalam menjalankan bisnisnya, orang-orang Cina Fujian mempunyai cara tersendiri, mereka memotong sebagian dari keuntungan bisnisnya untuk dikirim ke tempat asalnya untuk kepentingan bisnis. Disamping posisi ekonomi mereka yang lebih kuat, khususnya dibidang perdagangan orang Fujian mudah menjalin hubungan yang erat dengan penguasa/pengusaha lokal di Indonesia. Posisi ekonomi mereka ini kemudian direfleksikan pula dalam posisi politik. Pada masa VOC misalnya posisi-posisi (jabatan) resmi yang dipegang oleh Cina perantauan seperti Letnan, Kapitan dan Mayor pada umumnya dipegang oleh orang-orang Cina: Fujian, antara lain So Beng Kong dan Khouw Kim An.

Dengan diintrudosirnya sistim liberal pada tahun 1870 banyak orang Eropa secara private (pribadi) datang ke Batavia untuk be-

kerja pada pemerintah Hindia Belanda, baik sebagai sipil maupun militer. Selama abad ke-19 diberitakan jumlah wanita-wanita Eropa meningkat hampir 50 kali lipat dibandingkan lima puluh tahun sebelumnya. Perkembangan kapitalisme agraris mendorong munculnya berbagai perusahaan perdagangan, bank-bank dan industri sehingga makin banyak pegawai dan orang-orang lain yang menetap dikota. Sejak diberlakukannya Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830, di perkirakan penghasilan petani dan penduduk pribumi di daerah pedesaan menurun sekitar 18 persen, sehingga hal itu mendorong para petani berpindah ke kota (termasuk Jakarta) untuk mencari pekerjaan sebagai kuli . Dalam memperluas Sistem Tanam Paksa, Gubernur Jendral Van den Bosch mengadakan gerakan untuk meningkatkan partisipasi usaha swasta yakni dengan membuka penyewaan tanah untuk jangka panjang dengan syarat-syarat yang mudah untuk ditanami dengan komoditi ekspor seperti kopi, teh dan tebu. Gerakan ini ternyata berhasil menarik pada pendatang dari Negeri Belanda yang jumlahnya kian meningkat karena melihat prospek yang menguntungkan di Hindia Belanda. Kecuali itu meningkatnya jumlah para imigran dari Eropa karena semakin lancarnya transportasi laut, lebih²⁵⁾ setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, hubungan antara Batavia dan Eropa dapat dipersingkat. Pada abad ke-18 diperlukan waktu berlayar selama 3 sampai 6 bulan dengan segala resikonya, namun setelah tahun 1869 dibutuhkan waktu hanya 30 hari untuk pelayaran langsung dari atau ke Amsterdam atau ke pelabuhan-pelabuhan lain di Eropa. Sampai akhir abad ke-19 pelayaran didominasi bangsa Inggris, namun dengan didirikannya Koninklijk Paketvaart Maatschappij pada tahun 1888, Belanda berusaha

ha mengambil alih pelayaran di Indonesia ditangan sendiri. Selain itu pembangunan transportasi darat seperti jalan-jalan dan rel kereta api berkembang dengan pesat, baik di Jawa maupun di Sumatera. Pada awal abad ke-20 pembangunan jalan meningkat dengan tajam karena berdasarkan peraturan desentralisasi pemerintahan, hal itu di serahkan kepada pemerintah daerah. Disamping itu pengusaha perkebunan diwajibkan membangun jalan-jalan yang digunakan untuk mengangkut hasil yang diolahnya. Sedangkan dalam sejarah perkeretaan apian di Jawa, peristiwa yang amat penting adalah pada saat bertemunya lin barat (westerlijn), yaitu trayek Batavia-Yogyakarta dengan lin timur (oosterlijn), yaitu trayek Yogyakarta-Surabaya pada tahun 1894. Lancarnya sarana komunikasi dan transportasi selain meningkatkan mobilitas penduduk, juga akah mendorong migrasi dan urbanisasi terutama ke kota-kota yang menonjol peranannya pada abad ke-19, yaitu Batavia, Semarang dan Surabaya. Memasuki abad ke 20 peran Jakarta telah berkembang menjadi pusat kebudayaan barat antara lain pendidikan modern. Meningkatnya jumlah orang Eropa yang tinggal di Jakarta menginginkan sistim pendidikan yang setarap dengan pendidikan di Negeri Belanda sehingga anak-anak mereka tidak merasa dirugikan tinggal di daerah jajahan. Selain itu dengan diberlakukannya politik Etis sejak tahun 1901 perhatian pemerintah dibidang pendidikan meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sekolah-sekolah dibangun mulai dari sekolah rendah sampai perguruan tinggi. Dibandingkan dengan daerah (kota)besar lainnya di Jawa, Jakarta memiliki fasilitas/sarana pendidikan yang paling lengkap sehingga menjadi daya tarik para pemuda datang untuk melanjutkan pendidikannya.

Sebagian dari dampak pendidikan ialah terjadinya pergaulan antar etnik antarapara pelajar dan mahasiswa dari berbagai pelosok di tanah air yang pada gilirannya membangkitkan jiwa nasionalisme mereka sebagai satu bangsa. Pemuda-pemuda Jawa untuk pertama kalinya bertemu dan bergaul tidak hanya dengan orang-orang Eropa, tapi juga dengan pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatera, Amboj, Selebes, Sunda dan lain sebagainya. Pada permulaannya mereka ini mendirikan organisasi (perkumpulan) pemuda yang mencerminkan etnik dan bersifat kedaerahan seperti Jong Ambon, Jong Java, Jong Selebes dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya muncul suatu organisasi yang bersifat nasional, yakni dengan didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sekelompok mahasiswa Stovia. Sejak itu kota Jakarta berkembang menjadi pusat pergerakan nasional yang bertujuan untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan.

Pada tahun 1940 jalan-jalan utama di Jakarta sudah diaspal , dan banyak pohon-pohonan yang ditebang untuk pemasangan kabel listrik dan telepon. Bangunan-bangunan baru yang memberikan aspek dan warna baru dalam kehidupan masyarakat perkotaan mulai dibangun, seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, pusat-pusat hiburan seperti bioskop dan kolam-kolam renang. Semua itu merupakan faktor penarik (push-factor) para imigran datang dan bermukim di Jakarta, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penduduk.²⁷⁾

Dari tabel 2 bahwa antara tahun 1883 sampai tahun 1885 penduduk kota menurun sekitar 28 persen. Asumsi yang diberikan mungkin karena pada waktu itu sebagian penduduk pindah ke luar kota seba -

gai dampak ditemukannya sarana angkutan kota yang lebih canggih yaitu tram kota pada tahun 1864. Dugaan ini dikaitkan dengan meningkatnya jumlah penduduk di wilayah kabupaten dan karesidenan pada kurun waktu yang sama.

Selain pada jumlahnya, perkembangan penduduk Jakarta dapat juga diamati pada tingkat heterogenitas dan lokasi pemukimannya. Data kependudukan akhir abad ke-18 yang dilaporkan oleh De Jonge menyebutkan bahwa penduduk Jakarta terdiri dari 18 kelompok etnis yakni, orang Eropa, Mestizo, Mardiker, Melayu, Jawa (termasuk Sunda) Moor, Cina, Bali, Makasar, Ambon, Banda, Buton, Bugis, Timor, Mandar, Sumbawa dan Budak. Bahkan secara khusus disebutkan pula kelompok orang-orang Islam dan Kristen pribumi. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa dari 141.501 jiwa penduduk Jakarta pada tahun 1888 yang dilaporkan oleh De Jong, sekitar 95 persen diantaranya bermukim di luar kota (di luar tembok keliling kota). Selain lahan di dalam kota tidak cukup untuk menampung jumlah penduduk, berpindahnya penduduk ke luar kota juga disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang sehat. Dibandingkan dengan periode sebelumnya (abad ke-17) tingkat heterogenitas penduduk sudah cukup tinggi. Pada tahun 1815 Raffles melaporkan 16 kelompok etnis (lihat tabel no.4) yakni orang-orang Eropa, Arab, Moor, Melayu, Jawa, Bugis, Makasar, Mandar, Bali, Sumbawa, Ambon, Banda, Timor, Buton, Cina (termasuk peranakan) dan yang terakhir budak. Tidak dicantumkan kelompok Mestizo (Indo) dan Mardiker karena secara administratif disatukan dengan kelompok lainnya. Ada kemungkinan kelompok Mestizo (Indo) ini disatukan dengan orang Eropa, sedangkan kelompok Mardiker

disatukan dengan kelompok etnis pribumi dari mana mereka berasal, sebab pengertian Mardiker pada abad ke-19, termasuk di dalamnya budak-budak pribumi yang dimerdekakan. Bagi yang beragama Kristen ada kemungkinan mereka dimasukkan dalam kelompok Kristen Pribumi. Pada periode berikutnya tampaknya sistim pencacahan penduduk lebih disederhanakan dan itu tidak berarti bahwa tingkat heterogenitas penduduk semakin menurun. Sebagai contoh dalam arsip-arsip kompe - ni ni dari tahun 1821 - 1855, hanya disebutkan 5 (lima) kelompok penduduk atau golongan penduduk yaitu, orang-orang Eropa, Kristen Pribumi, Cina, Moor dan Inlander, bumi putera atau pribumi.²⁸⁾

Meskipun budak (perbudakan) secara resmi baru dihapuskan pada tahun 1860, namun data kependudukan akhir abad ke-18 memperlihatkan bahwa populasi penduduk terus menurun, yang antara lain disebabkan meningkatnya jumlah budak yang dimerdekakan oleh tuannya yang kembali ke negerinya. Jika demikian halnya maka kelompok budak yang sudah merdeka ini tentunya dimasukkan dalam kelompok Inlander. Disamping itu merosotnya jumlah budak ini karena dihapus - kannya (dilarangnya) perdagangan budak oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1812. Itulah sebabnya maka kelompok tidak dicantumkan sebagai kelompok tersendiri dalam komposisi penduduk Jakarta pada abad ke-19 dan periode sebelumnya. Sedangkan kelompok pribumi yang tadinya terdiri dari beberapa kelompok etnis, dijadikan satu kelompok yakni Inlander. Dari segi lokasi pemukiman, pada abad ke-19 tidak dibedakan antara penduduk yang bermukim di dalam dan di luar kota, sebab sejak tahun 1810 tembok keliling kota telah dihancurkan dan sebagian bahan bangunannya dipergunakan untuk

membangun Weltevreden.

Berkenaan dengan kehadiran kelompok Inlander, dalam sumber-sumber kolonial ada asumsi bahwa hal itu terjadi karena suku bangsa pribumi telah banyak kehilangan sifat kesukuan mereka, terutama melalui kontak perdagangan dan perkawinan campuran diantara mereka yang kemudian melahirkan suatu etnis baru yang disebut sebagai orang Betawi. Kapan suku Betawi ini terbentuk tidak dapat ditentukan dengan pasti, sebab hal itu merupakan hasil dari suatu proses yang berjalan cukup panjang. Tetapi secara kultural, kebudayaan Betawi merupakan perpaduan unsur-unsur budaya etnik pribumi dengan elemen-elemen asing. Sebagai contoh, bentuk rumah mereka merupakan kombinasi unsur-unsur arsitektur Bugis, Makasar, Cina dan Belanda, seperti yang tampak pada rumah si Pitung di daerah Marunda. Demikian halnya dengan seni ondel-ondel, seni khas Betawi, memperlihatkan pengaruh seni barong yang hingga sekarang masih digemari di Bali. Suku Betawi bermukim di seluruh kota, bahkan di seluruh distrik sampai ke daerah-daerah perbukitan. Tetapi yang menarik meskipun perkampungan mereka lokasinya berdekatan dengan pusat kota, cara hidup mereka tetap memperlihatkan ciri dan suasana kedesaan, seperti gambaran Susan Abeyasekere mengenai kampung Kwitang, sebuah perkampungan Betawi di daerah Weltevreden pada tahun 1890.²⁹⁾

Pada sensus tahun 1930 orang-orang Betawi ini disebut sebagai orang Jakarta Asli yang berjumlah sekitar 53 persen dari seluruh penduduk Jakarta. (lihat tabel no. 5) Jadi lebih dari separuh penduduk Jakarta yang pada waktu itu berjumlah 786.800 jiwa. Yang

menarik dari data sensus tahun 1930 itu ialah bahwa penduduk dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu pribumi dan non-pribumi. Pembagian ini tampaknya dikaitkan dengan peraturan perundangan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mengenai orang-orang Eropa, Timur Asing dan Bumi Putra atau pribumi. Penduduk pribumi dibagi menjadi beberapa kelompok yang didasarkan beberapa kriteria, seperti daerah asal, etnis dan lokasi pemukiman mereka. Orang Jawa sudah dipisahkan dengan orang Sunda, selain itu muncul pula kelompok etnis yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu Minangkabau, Madura dan Batak.

Orang Depok dan Tugu adalah penduduk yang bermukim di daerah Depok (sekarang: Depok Lama) dan di kampung Tugu, Jakarta Utara. Nenek moyang mereka tergolong orang-orang Mardiker, karena mereka adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Orang Tugu adalah bekas budak Portugis, sedangkan orang Depok tadinya adalah budak-budak yang berasal dari berbagai daerah (etnis), terutama dari Bali dan Sulawesi Selatan yang ditempatkan di daerah Depok oleh Cornelis Castelein untuk mengurus tanah partekelir miliknya. Setelah memeluk agama Kristen mereka dimerdekakan dan setelah Castelein meninggal pada tanggal 28 Juni 1714, tanah miliknya di Depok menjadi milik bekas budaknya sesuai dengan surat wasiat yang ditinggalkannya.

Dilihat dari lokasi pemukimannya, penduduk pribumi tinggal dalam perkampungan yang tersebar di seluruh Jakarta. Perkampungan ini tidak lagi didasarkan pada etnis tertentu, sebab lokasi mereka bermukim lebih banyak dikaitkan dengan pekerjaan (profesi) mere-

ka sehari-hari seperti petani, nelayan, pedagang sayuran dan buah-buahan dan sebagai kuli di Tanjung Perioek. Mereka menempati rumah-rumah dari kayu berdinding anyaman bambu atau gedek yang di kelilingi kebun buah-buahan dan sayuran. Di daerah-daerah yang padat penduduknya, pada abad ke-19 penduduk pribumi menempati pondok--pondok sempit yang seringkali menimbulkan bahaya kebakaran. Dalam sensus tahun 1930 dilaporkan bahwa pekerjaan penduduk pribumi antara lain sebagai pelayan domestik, bekerja di sektor angkutan, industri terutama industri batik dan sigaret, perdagangan dan pelayanan pemerintah.³⁰⁾ Sensus tahun 1930 juga mencatat bahwa kuli-kuli yang bekerja di Tanjung Perioek pada umumnya berasal dari daerah Tangerang dan Banten; sedangkan orang-orang yang berasal dari Bogor dan Jawa Tengah lebih senang bekerja sebagai pelayan rumah tangga, tukang seterika dan penjual sayuran.³¹⁾ Dalam suatu penelitian yang dilakukan di daerah Senen pada tahun 1936, di peroleh data bahwa para penjaja barang dagangan yang berasal dari berbagai daerah menjajakan jenis produk tertentu. Sebagai contoh, penjaja limun dan ice cream pada umumnya berasal dari daerah Sunda dan Jawa Tengah, sedangkan penjual gado-gado pada umumnya berasal dari daerah Cirebon dan Kuningan.³²⁾ Meskipun belum ada data resmi, diperkirakan jumlah pribumi pada tahun 1815, 33.000 jiwa, pada tahun 1900 menjadi 78.000 jiwa. Kalau berpegang pada hasil sensus tahun 1930, maka jumlah pribumi adalah 653.500 jiwa dari seluruh penduduk Jakarta Raya yang berjumlah 786.800 jiwa. (lihat tabel no. 5)

Berbeda halnya dengan pribumi, orang-orang Eropa menempati

daerah-daerah elit seperti Weltevreden, Menteng, Gondangdia dan sepanjang jalan utama di Meester Cornelis dan Gunung Sahari. Perkampungan mereka diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kesan eksklusif.³³⁾ Kecuali orang Belanda, pada absensus tahun 1930 tercatat 808 orang Jerman dan 751 orang Inggris. Pada tahun 1936 jumlahnya menjadi 955 untuk orang Jerman dan 486 untuk orang Inggris.³⁴⁾ Orang-orang Indo bermukim di daerah pinggiran (suburd) sekitar Kemayoran. Diperkirakan jumlah orang-orang Eropa dan Indo atau Mestizo pada abad ke-19 sekitar 3 persen dari seluruh jumlah penduduk, sedangkan pada tahun 1930, jumlah orang Eropa (tentunya termasuk Indo) sekitar 4,5 persen.

Orang-orang Cina yang merupakan kelompok timur asing terbesar menempati lokasi perdagangan di daerah Glodok, Pasar Baru dan Senen. Bahkan sampai dengan periode kemerdekaan, di daerah-daerah tersebut masih ada kalurahan yang mayoritas penduduknya orang-orang Cina. Pada mulanya orang Cina banyak yang tinggal di kampung - kampung dan berkumpul dengan penduduk asli, namun dengan dikeluarkannya Wijken-Stelsel pada tahun 1919, mereka harus meninggalkan rumahnya yang lama untuk berkumpul dengan sesama etniknya, sehingga munculah kampung Cina. Jumlah orang Cina terus meningkat, pada tahun 1900 diperkirakan jumlah mereka 24.000 jiwa, tapi 30 tahun kemudian (1930), jumlah orang Cina dilaporkan 88.200 jiwa atau sekitar 11 persen dari jumlah penduduk Jakarta Raya pada waktu itu. Glongan Cina pada umumnya hidup dari perdagangan, mereka mendirikan firma-firma, kongsi-kongsi dagang besar, membuka toko atau berjualan di pasar-pasar. Ada juga diantara mereka yang membuka usaha ke-

rajinan seperti kerajinan rotan, membuat mebel, perusahaan batik, sepatu dan sebagainya. Mereka yang bekerja di kantor-kantor pada umumnya memilih kantor-kantor bank sebagai kasir maupun fungsi-fungsi yang lain.

Selain orang-orang Eropa dan Cina masih ada satu kelompok non pribumi yang dalam sensus tahun 1930 dimasukkan dalam kelompok lain-lain. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang Timur Asing selain orang Cina seperti orang-orang Arab, Moor, bahkan ada orang Jepang yang pada tahun 1930 tercatat berjumlah 472 orang. Pada tahun 1936 jumlah orang Jepang menjadi 528 orang. Orang-orang Moor sering dihubungkan dengan orang-orang Islam berasal dari India, perkampung mereka dikenal dengan Kampung Koja (Pakojan). Tetapi pada pertengahan abad ke-19 Kampung Koja ini sudah ditempati oleh orang-orang Arab dari Hadramaut yang datang ke Hindia Belanda membawa ide-ide pembaharuan dalam agama Islam. Sebagaimana halnya orang-orang Cina, orang Arab inipun pada mulanya tidak bermukim dalam satu perkampungan khusus, namun dengan dikeluarkannya Wijken - Stelsel, munculah kampung Arab. Pekerjaan mereka hampir sama dengan orang-orang Cina, sebagai pedagang, Mereka menjadi perantara antara orang-orang Eropa dengan penduduk pribumi dalam dunia perdagangan.

PENUTUP

Jakarta sebagai pusat pemerintahan kolonial mengalami perkembangan, baik secara kewilayahan, fungsinya dalam sistim pemerintahan maupun jumlah penduduknya. Sebelum dilaksanakan sensus penduduk tahun 1920 dan 1930, perhitungan jumlah penduduk seperti yang terekam dalam sumber arsip belum dikaitkan dengan status dan luas wilayahnya sehingga terjadi tumpang tindih antara penduduk Karesidenan, Kabupaten dan Kotapraja. Sejak tahun 1855 Jakarta (Batavia) ditetapkan sebagai Karesidenan yang wilayahnya meliputi Kota Lama dan Kota Depan (Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia) ditambah dengan Afdeeling Tangerang, Afdeeling Buitenzorg, Afdeeling Karawang dan Kepulauan Seribu, jumlah penduduknya 886.156 jiwa. Berdasarkan Ordonantie Staatsblad van Nederlandsch-Indie no.24 tanggal 16 Maret 1905 Jakarta (Batavia) ditetapkan menjadi Gemeente (Kotapraja) dengan wilayah yang lebih sempit dari sebelumnya yaitu Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia ditambah dengan daerah Menteng dan Gondangdia, jumlah penduduknya 1.555.808 jiwa. Dengan dikeluarkannya peraturan no.366 tahun 1926 status Jakarta (Batavia) berubah lagi menjadi Stadgemeente atau Regenschap yang setingkat dengan kabupaten, wilayahnya hampir sama dengan sebelumnya, namun sejak tahun 1935 wilayahnya diperluas dengan memasukkan Afdeeling Meester Cornelis (Jatinegara).

Seiring dengan perubahan status dan wilayah Jakarta (Batavia) penduduknyapun mengalami perkembangan yang pesat, baik jumlah maupun tingkat heterogenitasnya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya secara administratif pencatatannya lebih disederhanakan untuk

disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Orang-orang asing non Eropa seperti Cina, Moor, Arab secara administratif disatukan dalam satu kelompok yang disebut orang-orang Timur Asing, sedangkan etnis pribumi dalam kelompok Inlander. Dengan demikian ada tiga kelompok penduduk yaitu orang Eropa, Timur Asing dan Inlander (bumi putra); setiap kelompok penduduk diberlakukan peraturan hukum yang berbeda. Sejak tahun 1860 perbudakan dihapuskan sehingga bekas budak-budak pribumi disatukan dengan Inlander, sedangkan kelompok Mardiker sebagian disatukan dengan kelompok Inlander dan sebagian lagi dengan kelompok Timur Asing. Kelompok Indo (Mestizo) yaitu hasil kawin campur antara orang-orang Eropa dan Asia disatukan dengan kelompok Eropa. Kalau pada zaman VOC demarkasi penduduk lebih banyak didasarkan pada perbedaan agama, namun pada masa Hindia Belanda perbedaan etnik dan asal usul lebih ditonjolkan.

Sehubungan dengan munculnya kelompok Inlander diasumsikan bahwa etnis pribumi telah banyak kehilangan sifat kesukuan mereka karena kontak perdagangan, kawin campur diantara mereka sehingga melahirkan etnis baru yang disebut orang Betawi. Kapan suku Betawi terbentuk tidak dapat ditentukan secara pasti karena merupakan hasil dari suatu proses yang cukup lama. Secara kultural budaya Betawi merupakan perpaduan antara budaya etnik pribumi dengan elemen-elemen asing, seperti yang dapat dimati pada bentuk rumah tinggal mereka, kesenian dan bahasa yang dikenal sebagai bahasa Melayu-Betawi.

Orang-orang Eropa bermukim di Weltevreden, Gondangdia, Menteng, dan sepanjang jalan-jalan utama di Meester Cornelis dan Gunung Sahari, sedangkan di luar ibukota mereka tinggal di tanah-tanah parte -

kelir dengan hak usaha. Di dalam kota pemukiman orang-orang Eropa ini ditata sedemikian rupa sehingga memberi kesan eksklusif, sedangkan dari segi topografi pada umumnya lahannya lebih tinggi dan lebih sehat sehingga dikategorikan sebagai daerah elit. Orang-orang Timur Asing terutama orang Cina dan Arab menempati lokasi-lokasi perdagangan seperti Pasar Senen, Pasar Baru dan Glodok, sedangkan pribumi (Inlander) tersebar didalam dan di luar kota karena lokasi mereka bermukim disesuaikan dengan profesi dan pekerjaan mereka. Meskipun secara keseluruhan jumlah penduduk meningkat, namun menjelang berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda jumlah orang-orang Eropa cenderung menurun, dan gejala ini tidak hanya terjadi di Jakarta, juga diseluruh wilayah Hindia Belanda.

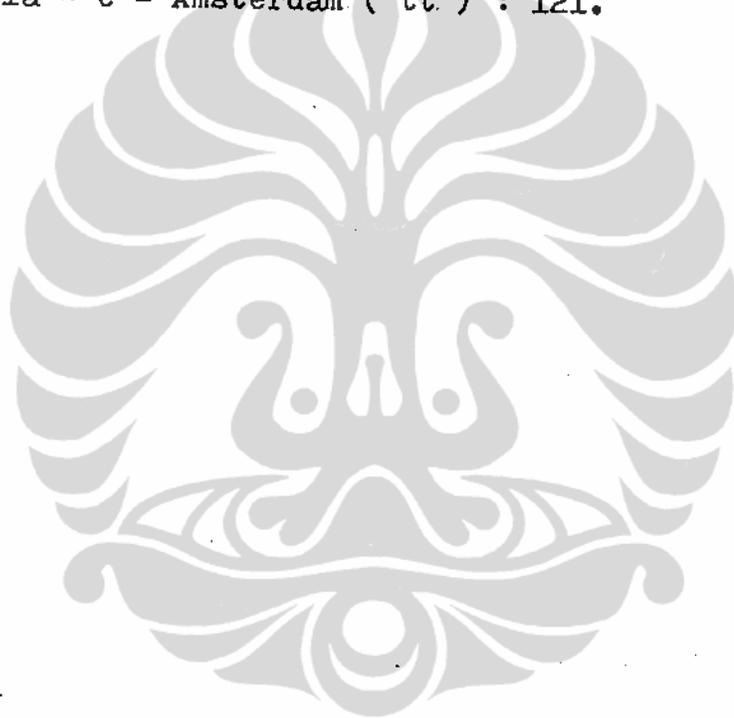
Catatan

- 1). The Liang Gie, Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta. Kotapradja Raja, 1958 : 25; Periksa juga, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. PT Gunung Agung, Jakarta, 1967.
- 2). IBID.: 27.
- 3). Robert Cribb, "Introduction, The late Colonial state in Indonesia", dalam Robert Cribb (edited) The Colonial State in Indonesia, Political and Economic Foundation of the Netherlands Indies 1880-1942, VBG, 165, KITLV Press, Leiden 1994 : 3.
- 4). Loc.cit.
- 5). IBID :3-4 , Posisi Komisaris Jendral diintrodusir pada tahun 1819 yang diberi wewenang istimewa oleh raja Belanda (Periksa: Kleintjes, Ph, Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indie, vol.I: 199)
- 6). Robert Cribb, op.cit.: 4 . Tentang perubahan sistim pemerintahan masa Hindia Belanda secara panjang lebar juga telah diuraikan oleh James L.Cobban, The City on Java: An Essay in Historical Geography, 1970: 99-120; I.M.van der Kroef, "Indonesia and The Evolution of The Netherlands Empire", dalam Indonesia in the Modern World, part I, Masa Baru- Bandung, Indonesia, 1954: 1-60)
- 7). Sartono Kartodirdjo, A. Sudewo, Suhardjo Hatmosuprobo, Perkem - Peradaban Priyayi. Gadjah Mada University Press, 1987: 15-16
- 8). Willard A. Hanna, Hikayat Jakarta. Diterjemahkan oleh Mein Joe - bhar & Ishak Zahir, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988: 177.
- 9). Edi Sedyawati, Supratikno Rahardjo, Irmawati Johan, G.A.Moni - let Ohorella, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980. Departemen Pendi - dikan dan Kebudayaan, Direktorat Senitra, Proyek IDSN, 1986/19 87 : 95; Lasmidjah Hardi, Jakartaku-Jakartamu-Jakarta Kita. Ya - yasan Pencinta Sejarah dan Pemda DKI Jakarta Raya, 1987: 92)
- 10). Mona Lohanda, Iman Hilman, Bastomi Ervan, Abdurachman Surjomi - hardjo, Sejarah Sosial DKI Jakarta Raya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Senitra, Proyek IDSN, 1984: 5.
- 11). Susan Abeyadekere, Jakarta A History. Singapore: Oxford Univer - sity Press, 1989: 90. Kalau pada masa VOC orang-orang kaya (o - rang Eropa dan Cina) tinggal di dalam kota dan membangun rumah di kanan-kiri jalan utama yang menutupi perkampungan penduduk dibelakangnya.
- 12). M.Joustra, "Het Batavia van Heden", Indie, Geillustreed Weekblad Voor Nederland en Kolonien, 3e jrg.no.5, 30 April 1919: 155; Pe - riksa juga, Mona Lohanda dkk. op.cit.:5-7; Lasmidjah Hardi, op. cit.: 91-93.
- 13). Mona Lohanda dkk. op.cit.: 6-8; Lasmidjah Hardi, op.cit.: 92-93.

- 14). Periksa: Batavia Als Handels, Industrie en Woonstads. Samengesteld in Opdracht van de Stadsgemeente Batavia (Batavia as Commercial Industrial and Residential Center. Writen for the City Municipality of Batavia). G.Kolf & Co. Batavia -C-Ams-terdam (tt): 121.
- 15). Josselin de Jong, De Opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java, deel VIII, 1883; deel IX, 1883.
- 16). Periksa: Staat de Bevolking onder ultimo November 1822 Resi-dentie Batavia. Arsip Nasional, Batavia 338,1882.
- 17). Abdul Djalal, "Perkembangan Penduduk Jakarta Abad 16-20", Widyapura, no.9-10 Th.I, 1977: 12.
- 18). Susan Abeyasekere, op.cit.: 52.
- 19). V.F.C. Maronier, "Drinkwartervoorziening van Batavia", De Waterstaats Ingenieur, vol.17e Agustus 1929: 223-544.
- 20). Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia. London and New 1951 :
- 21). Kong Yuan Zhi, "A Study of Chinese Loanwords (From South Fujian Dialects) in The Malay and Indonesian Languages", BKI 143, 1987: 451.
- 22). Periksa Indiache Verslag 1940: 47
- 23). Kong Yuan Zhi, op.cit.: 454 - 456.
- 24). Loc.cit.
- 25). Willard A.Hanna, op.cit.: 191.
- 26). Pada abad ke-19 jaringan jalan di Jawa mencapai panjang 20.000 km, ada 250 jembatan batu yang panjangnya lebih dari 10 meter, 1500 jembatan kecil dan kurang lebih 10.000 jembatan besi . (Periksa: Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium, jilid I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992: 362-367.
- 27). Kecuali adanya faktor pendorong dan penarik, meningkatnya jumlah penduduk mungkin juga karena angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Menurut Dr. de Haas, kelahiran di Batavia tahun 1934 adalah 35 % dan angka kematian bayi/anak pada tahun pertama setelah kelahirannya tidak kurang dari 30 %.
- 28). Periksa: Arsip Nasional. Batavia 352.1; Batavia 353.2; Batavia 353.3; Batavia 353.4; Batavia 353.5)
- 29). Susan Abeyasekere, op.cit.: 66
- 30). Susan Abeyasekere, op.cit.: 64. Pada tahun 1910 di Batavia dan Meester Cornelis ada 103 perusahaan Batik, pada tahun 1929 jumlahnya menjadi 357 perusahaan, diantaranya 264 buah dipimpin oleh orang-orang Cina dan 93 buah milik pribumi, yang tidak menggunakan tenaga luar tetapi semata-mata merupakan

perusahaan keluarga. (Periksa: J.van Gelderen, J.H.Boeke dan J.Tideman, Tanah Dan Penduduk Di Indonesia, Bhratara Karya Aksara- Jakarta 1985: 68)

- 31). Susan Abeyasekere, op.cit.: 64.
- 32). Loc.cit.
- 33). IBID: 90. Selain di ibukota orang-orang Eropa tinggal terpen- car diberbagai tanah-tanah partekelir dan persil-persil deng- an hak usaha. (Periksa: J.van Gelderen, J.H.Boeke dan J Tide- man; op.cit.: 54).
- 34). Periksa: Batavia Als Handels, Industrie en Woonstad. Samenge- steld in Opdracht van de Stadsgemeente Batavia. G.Kolf & Co. Batavia - c - Amsterdam (tt.) : 121.



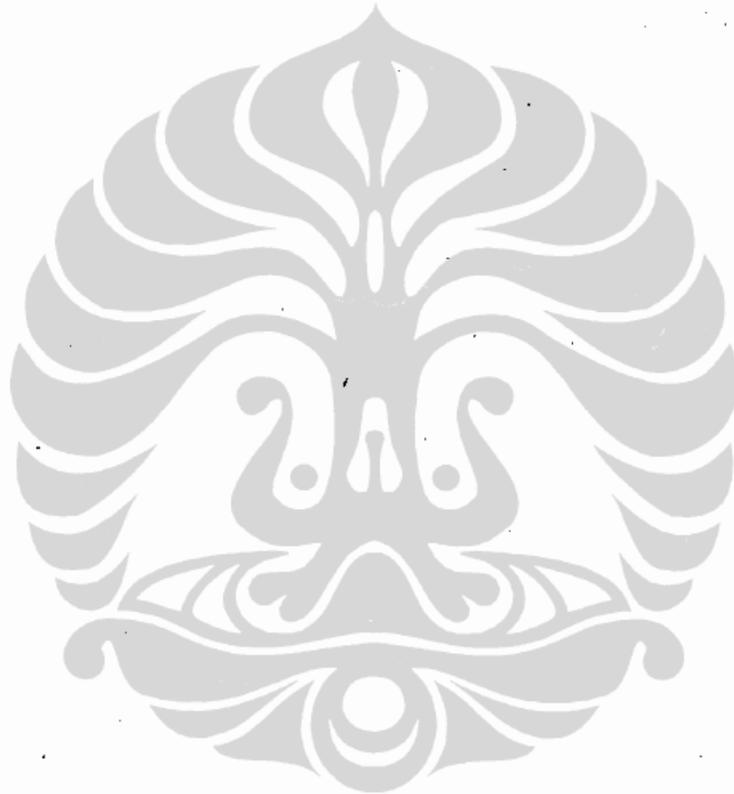
DAFTAR PUSTAKA

- Abeyasekere, Susan, Jakarta A History. Singapore: Oxford University Press, 1989.
- Cobban, James L , The City on Java: An Essay in Historical Geography. University of California, Berkeley, 1970.
- Cribb, Robert, "Introduction, The late Colonial state in Indonesia" dalam Robert Cribb. (edited) The Late Colonial State in Indonesia, Political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942, VBG, 165, KITLV Press , Leiden 1994: 1-9.
- Castles, Lance, "The Ethnic Profile of Djakarta", Indonesia vol.I, April 1963: 153-204.
- Djalal, Abdul, "Perkembangan Penduduk Jakarta Abad 16-20", Widyapura, no.9-10 Th.I, 1977: 9-15.
- Everett, S.Lee. Suatu Teori Migrasi. Diterjemahkan oleh Hans Daeng, seri terjemahan no.3, Puslit Kependudukan UGM, 1987.
- Gorkom, W.J.van , "Ongezond Batavia, Vroeger en Nu, Nordzakelijkheid van een organieken stedelijken Gezondheidsdienst", Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, deel LIII, 1913: 177-344.
- Hadisutjipto, S.Z. Sekitar 200 Tahun Sejarah Jakarta (1750-1945) Pemda DKI, Jakarta, Dinas Museum & Sejarah, 1979.
- Hardi, Lasmidjah, Jakartaku-Jakartamu-Jakarta Kita. Yayasan Pencinta Sejarah dan Pemda DKI Jakarta Raya, 1987.
- Jonge, J.K.J. de, De Opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java. Amsterdam; Frederik Muller, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff, 13 vols, 1862-1909.
- Joustra, M. "Het Batavia van Heden", Indie, Geillustreed Weekblad voor Nederland en Kolonien, 3e jrg. no.5, 30 April, 1919.
- Kartodirdjo, Sartono, A Sudewo, Suhardjo Hatmosuprobo, Perkembangan Peradaban Priyayi. Gadjah Mada University Press, 1987.
- Lekkerkerker, C. "Batavia in 1819", Indie, Geillustreed Weekblad voor Nederland en Kolonien, 3e jrg.no.5, 30 April 1919.
- Liang Gie, The, Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta. Kotapradja Djakarta Raya, 1958.
- _____, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. P.T.Gunung Agung, Jakarta, 1967.

- Kroef, I.M.van der, "Indonesia and The Evolution of The Netherlands Empire", dalam Indonesia in the Modern World, part I, Masa Baru- Bandung-Indonesia, 1954: 1-60.
- Maronier, V.F.C."Drinkwartervoorziening van Batavia", De Waterstaats Ingenieur, vol.17e Agustus, 1929: 223-344.
- Monahanda, Iman Hilman, Bastomi Ervan, Abdurachman Surjomihardjo, Sejarah Sosial DKI Jakarta Raya. Depdikbud, Direktorat Senitra, Proyek IDSN, 1984.
- Purcell, Victor, The Chinese in Southeast Asia. London and New York 1951.
- Person, Gerard,"Congelation in The Melting Pot The Minangkabau in Jakarta", dalam Peter J.M.Nas (ed.) The Indonesian City, Studies in urban development and Planning, VKI 117, Foris Publications, 1986.
- Raffles, Thomas Stamford, The History of Java. vol.I dan II, Kuala Lumpur: Oxford University Press (tt).
- Republik Indonesia, Kotapradia Djakarta Raya. Kementerian Penerangan (tt).
- Sedyawati, Edi, Supratikno Rahardjo, Irmawati Johan, G.A.Monilet - Ohorella, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980. Depdikbud, Direktorat Senitra, Proyek IDSN, 1986/1987.
- Siswantari, Pembangunan Kota Kebayoran Sebagai Kawasan Pemukiman Penduduk (1948-1953). Skripsi Sarjana Sastra, Jurusan Sejarah FSUI, 1989.
- Soetanto, Soetopo, Djakarta Raya Pada Masa Pemerintahan Nasional Kota 17 Agustus 1945-21 Djuli 1947. Skripsi Sarjana Sastra Jurusan Sejarah FSUI, 1971.
- Yuan Zhi, Kong, "A Study of Chinese Loanwords (From South Fujian Dialects)in The Malay and Indonesian Languages", BKI , 143, 1987.
- Bosse, J.P. van, "Decentralisatie in Nederlandsch-Indie", De Gids no.39 (4), 1875: 417 - 452.
- Burger, D.H. Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, jilid I. Diterjemahkan oleh Prof.Dr.Mr.Prajudi Atmosudirdjo, PN.Pradajnja Paramita d/h J.B.Wolters-Jakarta, 1960.
- Deventer, C.Th. van, "Indische Decentralisatie - plannen " De Gids, no.65 (1), 1901 : 287 - 330.
- Fock, D. " Decentralisatie in Nederlandsch-Indie", Indische Gids, no.22 (1) 1900: 153 - 173.
- Geldereren, J.van, J.H. Boeke dan J. Tideman. Tanah Dan Penduduk Di Indonesia. Diterjemahkan dengan pengawasan Dewan Redaksi oleh Drs. Nalom Sihan dan J.B.Soeharsa, Bhratara karya Aksara, Jakarta 1985.

Kartodirdjo, Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, jilid I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Liem Twan Djie, Perdagangan Perantara Distribusi Orang*Orang Cina di Jawa, Suatu Studi Ekonomi. Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV) bersama PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.



Tabel 1

Komposisi Penduduk Kotapraja Jakarta Tahun 1920 dan 1930

Kelompok Etnis	Tahun 1920		Tahun 1930		Jumlah
	GB	MC	GB	MC	
Pribumi	186.836	42.819	325.978	83.677	639.310
Orang Eropah	24.540	4.833	31.130	5.940	66.449
Orang Cina	38.978	4.353	71.688	7.127	122.146
Orang Asing lain	3.464	468	6.388	1.081	11.401
Jumlah	253.818	52.473	435.184	97.831	839.306

Keterangan :

GB = Gemeente van Batavia

MC = Meester Cornelis

Sumber : Batavia, Als Handels, Industrie en Woonstad, hal. 121, setelah dilakukan penghitungan kembali dan disusun menurut kebutuhan.

Tabel . 2

Penduduk Jakarta Masa Hindia Belanda

Tahun	Kota	Kabupaten	Karesidenan	Sumber
1779	8.818	163.864	-	De Jonge
1788	7.173	134.328	-	De Jonge
1795	-	144.986	-	Nederburgh
1815	47.217	332.615	439.952	Raffles, Kol. Verslag.
1821	-	194.390	-	Arsipnasional
1845	-	-	676.893	Kol. Verslag
1848	-	283.527	-	Bleekers
1850	70.000	348.325	755.333	Susan Abeyasekere, Kolonial Verslag.
1855	-	-	866.156	Kolonial Verslag
1860	-	-	978.443	Kolonial Verslag
1865	-	524.264	1.084.684	Kolonial Verslag.
1868	-	929.413	-	Arsipnasional
1869	-	941.376	-	Arsipnasional
1870	-	948.283	1.175.929	Arsipnasional, Kolonial Verslag
1871	-	968.885	-	Arsipnasional
1872	-	976.988	-	Arsipnasional
1873	-	976.988	-	Arsipnasional
1875	92.017	960.013	1.225.041	Arsipnasional, Kolonial Verslag.
1879	-	971.128	-	Arsipnasional
1880	91.467	941.374	1.246.315	Arsipnasional, Kolonial Verslag.
1881	-	910.763	-	Arsipnasional

Tabel .. 2

1882	:	-	:	919.376	:	-	:	Arsipnasional
1883	:	121.637	:	916.915	:	-	:	Arsipnasional
1884	:	-	:	944.192	:	-	:	Arsipnasional
1885	:	88.176	:	965.698	:	1.291.065	:	Arsipnasional, Kolonial Verslag
1890	:	-	:	1.070.756	:	1.450.268	:	Kolonial Verslag
1893	:	110.669	:	-	:	-	:	Anthony Reid
1895	:	114.567	:	1.268.043	:	1.691.550	:	Kolonial Verslag
1900	:	115.887	:	1.431.808	:	1.938.006	:	Kolonial Verslag
1905	:	138.547	:	1.555.808	:	2.109.352	:	Kolonial Verslag
1917	:	231.463	:	1.776.301	:	2.444.642	:	Kolonial Verslag
1920	:	253.818	:	-	:	2.787.345	:	Sensus 1920
1930	:	435.184	:	786.800	:	2.637.035	:	Sensus 1930

Sumber : Abdul Djalal, 1967: 12, setelah dilakukan penyempurnaan seperlunya.

Tabel.3

Angka Kematian Orang Eropah Tahun 1819-1844

Tahun	: Jumlah Orang Eropah	: Meninggal	: Perseribu orang.
1819	: 1.300	: 296	: 227,7
1820	: 2.175	: 361	: 165,9
1822	: 2.525	: 333	: 131,9
1823	: 2.525	: 294	: 116,4
1824	: 3.025	: 322	: 106,4
1825	: 3.175	: 311	: 97,9
1826	: 3.187	: 248	: 77,8
1827	: 2.925	: 254	: 86,8
1828	: 2.967	: 197	: 66,4
1829	: 3.140	: 262	: 83,4
1830	: 2.730	: 263	: 96,3
1831	: 2.780	: 252	: 90,6
1832	: 2.836	: 197	: 69,5
1834	: 3.040	: 236	: 77,6
1835	: 3.050	: 223	: 73,1
1836	: 3.100	: 194	: 62,6
1837	: 3.332	: 270	: 81,0
1838	: 3.295	: 287	: 87,1
1839	: 3.140	: 201	: 64,6
1840	: 3.340	: 185	: 55,4
1841	: 3.420	: 215	: 62,9
1842	: 3.640	: 212	: 58,2
1843	: 3.660	: 194	: 53,0
1844	: 3.478	: 188	: 54,1

Sumber : W.J.van Gorkom, 1913 : 215-216.

Tabel . 4

Komposisi Penduduk Jakarta Tahun 1815

No	: Kelompok etnik	: Jenis kelamin		: Jumlah
		: Pria	: Wanita	
1	: Orang Eropah	: 367	: 176	: 548
2	: Orang Eropah yang lahir di daerah jajahan	: 706	: 779	: 1.485
3	: Arab	: 197	: 121	: 318
4	: Moor	: 71	: 48	: 119
5	: Melayu	: 1.756	: 1.399	: 3.155
6	: Jawa	: 1.782	: 1.549	: 3.331
7	: Bugis	: 1.032	: 831	: 1.863
8	: Makasar	: 1.148	: 881	: 2.029
9	: Bali	: 4.063	: 3.657	: 7.720
10	: Sumbawa	: 141	: 91	: 232
11	: Mandar	: 112	: 111	: 223
12	: Ambon dan Banda	: 57	: 25	: 82
13	: Timor dan Buton	: 16	: 8	: 24
14	: Peranakan Cina	: 357	: 248	: 605
15	: Cina	: 6.976	: 4.273	: 11.249
16	: Budak	: 7.001	: 7.238	: 14.239
Jumlah		: 25.782	: 21.435	: 47.217

Sumber : Raffles, vol.II: 246; Joustra,1919:155.setelah dilakuk-
kan perubahan menurut kebutuhan.

PERPUSTAKAAN
FAKULTAS-SASTRA UI.

Tabel. 5

Penduduk Jakarta Raya menurut sensus tahun 1930

	Batavia	Daerah sekitar	Jakarta Raya
<u>Pribumi:</u>			
Jakarta asli	192.897	226.000	418.900
Sunda	135.251	15.000	150.300
Jawa	58.708	1.000	59.700
Melayu	5.220	100	5.300
Kelompok Sulawesi Utara	3.736	100	3.800
Minangkabau	3.186	-	3.200
Kelompok Maluku	2.034	-	2.000
Batak	1.253	-	1.300
Orang Depok dan Tugu	721	200	900
Kelompok Sumatra Utara	799	-	800
Madura	317	-	300
Tidak diketahui	5.553	1.400	6.900
<u>Non-pribumi:</u>			
Cina	78.185	9.400	88.200
Eropah	37.076	100	37.200
Lain-lain	7.469	400	7.900
Jumlah	533.015	253.800	786.800
Sumber : Geraard Persoon, 1986: 178			